

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan komponen yang sangat strategis dan memiliki peran yang krusial bagi perekonomian negara, karena sektor ini menghasilkan sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor, dan menyerap tenaga kerja jutaan orang. Sebagai tulang punggung perekonomian, sektor ini tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi industri hulu dan hilir, serta berperan penting dalam konservasi sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan, dan pelestarian nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, pembangunan pertanian diprioritaskan oleh negara demi menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. (Bukhtiarova et al., 2019; Afriyanti et al., 2023).

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, sektor pertanian menjadi penopang utama dan pembangunan manusia, sehingga keberadaannya diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Provinsi ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang berkontribusi besar terhadap produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan sayuran. Sektor pertanian di Jawa Tengah tidak hanya sebagai penyedia pangan utama tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Restiani & Widyastuti, 2022; Bingawati et al., 2023). Keunggulan Jawa Tengah dalam

ketahanan pangan nasional dan regional terbukti melalui statusnya sebagai salah satu produsen pangan utama Indonesia (Iskandar et al., 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, dengan luas wilayah mencapai 3,43 juta hektar atau sekitar 25,04% dari keseluruhan Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki potensi pertanian yang besar, mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar Rp 651.723,53 miliar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024:1082). Secara nasional, sektor ini juga menempati posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 12,53% dengan nilai Rp 780.017,2 miliar, setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran (Badan Pusat Statistik Nasional, 2024).

Menurut BPS pada tahun 2023, Jawa Tengah memiliki 4.176.270 petani, 3.466.475 di antaranya adalah petani skala kecil yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektar. Hanya sekitar 2,5% dari petani ini yang telah mengadopsi praktik berkelanjutan seperti pertanian organik dan penggunaan non-pestisida. Dikarenakan sebagian besar penduduk Jawa Tengah bergantung pada kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian mereka sehingga pertanian mendorong stabilitas sosial dan membantu pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan (Suryanto et al., 2023; Wibowo et al., 2024).

Meskipun memiliki potensi besar, sektor pertanian di Jawa Tengah masih

menghadapi permasalahan yang memerlukan pendekatan terpadu dan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal. Menurut Lestari dan Nugroho (2020), perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakpastian dalam musim tanam dan memperburuk frekuensi serta intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan, yang mengganggu produksi pertanian dan sumber daya air berkualitas. Selain itu, topografi yang bervariasi di berbagai wilayah, dari dataran rendah hingga daerah pegunungan, mengakibatkan beragamnya jenis tanah dan ketersediaan air, sehingga memerlukan strategi pengelolaan lahan khusus wilayah (Boas et al., 2023; Wibowo et al., 2024).

Hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para petani di wilayah tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi petani. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung petani, termasuk distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan pompa air untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Ditjen PSP, 2024). Selain itu, pemerintah juga menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga saat panen raya (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Pada Desember 2023, Presiden Joko Widodo mengunjungi kabupaten Pekalongan untuk mengajak para petani, penyuluh pertanian, dan Babinsa dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi dan jagung, serta menambahkan subsidi pupuk. Sebab, dunia tengah menghadapi krisis pangan akibat pandemi, perang antara Rusia dan Ukraina, dan perang di Gaza antara

Israel dan Palestina (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2023). Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

Namun, disisi lain, sejumlah petani di berbagai daerah di Jawa Tengah telah menyuarkan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan mereka. Misalnya, petani di Kabupaten Demak menggelar audiensi dengan Dinas Pertanian dan Pangan setempat untuk menyuarkan keresahan terkait maraknya praktik mafia pupuk subsidi yang dinilai memberatkan petani (ARUSUTAMA, 2025). Selain itu, petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, melakukan aksi protes terhadap keberadaan pabrik semen yang dianggap mengancam sumber mata pencaharian mereka (Erdianto & Meiliana, 2018). Aksi protes ini mencerminkan ketidakpuasan petani terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan industri daripada kesejahteraan petani.

Di Kabupaten Magelang, faktor cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena El Niño memengaruhi produksi pertanian. Masa tanam padi yang biasanya dilakukan pada awal musim hujan menjadi bergeser hingga akhir Desember 2023 dan masa panen yang seharusnya dilakukan pada kuartal pertama 2024 pun ikut mundur hingga sekitar bulan April. Hal ini disebabkan curah hujan yang tidak kunjung turun hingga penghujung tahun, yang mengakibatkan petani kesulitan menyiapkan lahan dan memulai aktivitas pertanian (Hidayat, 2024). Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya mendukung sektor pertanian, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang

diambil benar-benar berpihak kepada petani. Hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan petani menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian di Jawa Tengah.

Salah satu strategi utamanya adalah dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pertanian. Pemerintah daerah perlu mendorong program-program pelatihan untuk petani agar mampu mengadopsi teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan air dan pemupukan yang efisien. Selain itu, pengembangan infrastruktur irigasi dan akses jalan yang baik sangat penting untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan meminimalkan kehilangan pascapanen (Nugroho, S. et al., 2021). Dengan adanya peningkatan kapasitas petani, diharapkan produktivitas meningkat dan ketahanan pangan lokal dapat terjaga (Ngatindriatun, 2022). Penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan juga menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan produktif, sehingga produksi pertanian dapat tetap optimal tanpa merusak ekosistem (Srinivasan, 2023).

Praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, wanatani, dan konservasi tanah dan air, sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi perubahan iklim, dan meningkatkan kesehatan tanah (Muhaimin et al., 2023; Saikanth et al., 2023). Praktik-praktik ini mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan produktivitas jangka panjang dan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi meningkatnya ancaman

perubahan iklim (Sukayat et al., 2023). Untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan, pemerintah daerah terus mendukung dan mengembangkan sektor pertanian dengan mempromosikan teknologi modern dan praktik berkelanjutan di kalangan petani. Pemberdayaan petani melalui pendidikan, dukungan kebijakan, dan akses ke sumber daya sangat penting untuk berhasil menerapkan praktik pertanian berkelanjutan di Jawa Tengah (Wibowo et al., 2024).

Diversifikasi produk serta optimalisasi potensi wilayah perlu menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pertanian di Jawa Tengah. Hasil analisis potensi sektor pertanian per kabupaten menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal yang tepat dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka akses ke pasar baru, termasuk pasar ekspor (Wibowo & Sari, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas petani guna menciptakan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Penguatan kebijakan yang mendukung perkembangan di bidang pertanian, disertai pemberian insentif kepada petani yang menerapkan praktik berkelanjutan, juga menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan sektor ini di masa depan (Rondhi et al., 2020). Selain itu, kemitraan strategis dengan lembaga riset dan organisasi lingkungan dapat memperkuat upaya adaptasi terhadap perubahan iklim serta meningkatkan mutu hasil pertanian secara menyeluruh (Institute for Essential Services Reform, 2023).

Modernisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah proaktif melalui kerja sama internasional sebagai

strategi untuk mempercepat transformasi pertanian. Kerja sama ini membuka peluang strategis, seperti akses terhadap model teknologi pertanian, sistem irigasi hemat air, benih unggul, serta pelatihan sumber daya manusia yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar global. Proses transfer teknologi dan pengetahuan dari negara mitra telah terbukti kerja sama mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai wilayah pertanian. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, termasuk produktivitas yang belum maksimal, efisiensi produksi yang perlu ditingkatkan, serta persoalan ketahanan pangan yang terus menjadi perhatian (Hermanto, 2018). Oleh karena itu, kerja sama internasional berperan penting dalam memperluas akses pasar ekspor bagi petani lokal dan memperkuat integrasi sektor pertanian ke dalam rantai pasok global, sehingga sektor ini menjadi lebih kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dengan menyadari pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan iklim, teknologi, dan ketahanan pangan, Indonesia semakin aktif menjalin kerja sama internasional guna mendorong kemajuan sektor pertanian. Negara ini terlibat dalam berbagai bentuk kemitraan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta investasi dalam praktik pertanian berkelanjutan. Contohnya, kerja sama Indonesia dengan *World Bank* melalui proyek *Improving Agricultural Value Chain Resilience* (ICARE) bertujuan membangun rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung produktivitas dan akses pasar bagi petani kecil (World Bank, 2022). Demikian pula, kolaborasi dengan Australia, Jepang, dan Belanda telah

membuka jalan bagi pertukaran teknologi, penelitian bersama, dan pengembangan praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim (Australian Centre for International Agricultural Research, 2021). Melalui upaya kolektif ini, sektor pertanian Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sektor yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga inklusif dan tahan terhadap krisis di masa depan.

Di tingkat subnasional, Indonesia telah menganut konsep hubungan *sister province/city* untuk mendorong pembangunan daerah melalui kerja sama internasional. Kerja sama ini telah memungkinkan beberapa provinsi dan kota yang di Indonesia melaksanakan berkolaborasi dengan mitra di luar negeri di berbagai sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan perdagangan. Khususnya Jawa Tengah, salah satunya, telah menjalin hubungan *sister province* dengan Queensland, Australia, sejak 1991, dengan fokus pada bidang-bidang seperti pertanian, pendidikan, dan penanggulangan bencana (Queensland Government, 2023). Kerja sama ini telah memfasilitasi pertukaran keahlian dan sumber daya, yang berkontribusi pada pengembangan praktik pertanian berkelanjutan di Jawa Tengah. Selain itu, kerja sama ini telah memberdayakan pemerintah daerah untuk terlibat dalam paradiplomasi, yang memungkinkan mereka untuk mengejar kerja sama internasional secara independen guna memenuhi kebutuhan daerah tertentu (Fannia, 2022).

Secara umum, Queensland merupakan salah satu negara bagian terbesar yang terletak di Australia Timur dan terpenting di Australia, baik dari segi luas wilayah sekitar 1,727,000km² maupun kontribusi terhadap perekonomian

nasional. Dapat dilihat bahwa Queensland memiliki proporsi lahan pertanian tertinggi di Australia yang dikelola lebih dari 80%, dibandingkan dengan negara bagian dan teritori Australia lainnya. Queensland memiliki reputasi global untuk produk pertanian yang berkualitas tinggi, aman, dan terpercaya. Dengan menggalakkan program-program yang mendorong pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pemerintah Queensland tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan. Sehingga Queensland dianggap sebagai rumah bagi banyak pengusaha dan inovator asing yang menciptakan, mengembangkan, dan memelihara teknologi yang digunakan di seluruh sektor pertanian (State of Queensland, 2023).

Komoditas industri utama Queensland diperkirakan telah mencapai \$24,44 miliar pada tahun 2022 hingga tahun 2023, mencakup sekitar 12% dari ekspor luar negeri Queensland, dan telah mempekerjakan lebih dari 363.000 orang di seluruh rantai pasokan agribisnis. Selain itu, Queensland memiliki wilayah tropis dan subtropis serta wilayah beriklim sedang yang kecil, sehingga menjadi tempat pengujian bagi para inovator untuk menguji coba teknologi mereka di berbagai lokasi geografis dan kondisi iklim. Hal ini memberikan peluang di berbagai industri untuk mengadopsi, mengadaptasi, dan memajukan teknologi digital (State of Queensland, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, Queensland dan Jawa Tengah memiliki kepentingan bersama yang dapat dicapai melalui kolaborasi. Queensland dan Jawa Tengah telah menjalin hubungan sebagai "*sister province*" sejak tahun 1991,

dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 23 September 1991 yang dilakukan oleh Gubernur H.M Ismail dengan Premier Wayne Goss di Brisbane, Queensland (Pramono, 2009). Kerja sama ini telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menjadi *sister province* tertua dibandingkan dengan negara lainnya, yang mencakup berbagai bidang, termasuk pertanian, pendidikan, dan ekonomi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kerja sama ini menjadi signifikan mengingat kedua wilayah memiliki keunggulan masing-masing dalam sektor pertanian. Queensland, sebagai salah satu pusat pertanian di Australia, dikenal dengan teknologi pertaniannya yang maju, riset tentang keberlanjutan, serta kebijakan agribisnis yang inovatif. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan komoditas unggulan seperti padi, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Namun, dibalik keunggulan memiliki tujuan lainnya sehingga dapat melakukan kerja sama. Queensland, dengan produk pertanian dan peternakan yang berkualitas tinggi, membutuhkan pasar ekspor untuk mempromosikan dan memasarkan hasil produksinya. Sementara itu, Jawa Tengah sedang mencari mitra kerja sama yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian. Melihat potensi besar yang dimiliki Queensland, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih Queensland sebagai mitra strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di wilayahnya.

Kondisi ini semakin kompleks pasca pandemi Covid-19, di mana ketahanan pangan global dan regional diuji oleh gangguan rantai pasok, fluktuasi

harga, dan meningkatnya risiko kerentanan terhadap sistem pangan. Hal ini, transformasi pertanian melalui penerapan teknologi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat resilien sektor pertanian terhadap krisis di masa depan. Modernisasi melalui adopsi teknologi seperti pertanian presisi, sistem irigasi hemat air, dan pemanfaatan digitalisasi agribisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, kerja sama internasional melalui mekanisme *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland, Australia, menawarkan potensi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Queensland memiliki kapabilitas teknologi pertanian yang maju serta pengalaman dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang dapat menjadi model bagi Jawa Tengah. Sebaliknya, Jawa Tengah memiliki keunggulan demografis, lahan produktif, dan potensi pasar yang besar, sehingga kolaborasi ini dapat menghasilkan hubungan saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam paradiplomasi dan interdependensi asimetris. Beberapa pertanian di Jawa Tengah juga telah melakukan teknologi pertanian sedikit demi sedikit.

Namun, kerja sama ini belum sepenuhnya dioptimalkan, terutama dalam implementasi teknologi pertanian berkelanjutan yang aplikatif dan kontekstual bagi kondisi geografis dan sosial Jawa Tengah. Belum adanya strategi khusus untuk memperkuat transfer teknologi, harmonisasi kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan potensi kerja sama ini secara maksimal. Oleh

karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana strategi optimalisasi kerja sama *sister province* ini dapat dirancang, dikembangkan, dan diterapkan secara efektif untuk mendukung agenda pertanian berkelanjutan pasca pandemi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memaksimalkan manfaat kerja sama dengan Queensland dalam memperkuat sektor agrikultur pasca pandemi Covid-19?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kerja sama antara Provinsi Jawa Tengah dan Negara Bagian Queensland dalam skema *sister province* dapat dimaksimalkan manfaatnya, khususnya dalam mendorong penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan setelah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kerja sama tersebut benar-benar memberikan dampak yang nyata terhadap sektor pertanian lokal di Jawa Tengah, baik dari sisi peningkatan produktivitas, efisiensi praktik pertanian, hingga kontribusinya terhadap kesejahteraan petani.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kontribusi nyata dari kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland dalam

pengembangan pertanian berkelanjutan, yang mencakup aspek alih teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis strategi kerja sama tersebut dalam meningkatkan kapasitas petani lokal dan hasil pertanian. Lebih jauh, penelitian ini memetakan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kerja sama, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan kompleksitas kolaborasi lintas daerah dalam sektor pertanian.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan pada dua aspek yang berbeda, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang interdependensi asimetris dan paradiplomasi, khususnya dalam sektor pertanian berkelanjutan. Analisis terhadap kerja sama Jawa Tengah–Queensland memberikan perspektif baru mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola ketimpangan manfaat dan mendorong inovasi teknologi, serta menjadi referensi bagi studi serupa di masa depan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

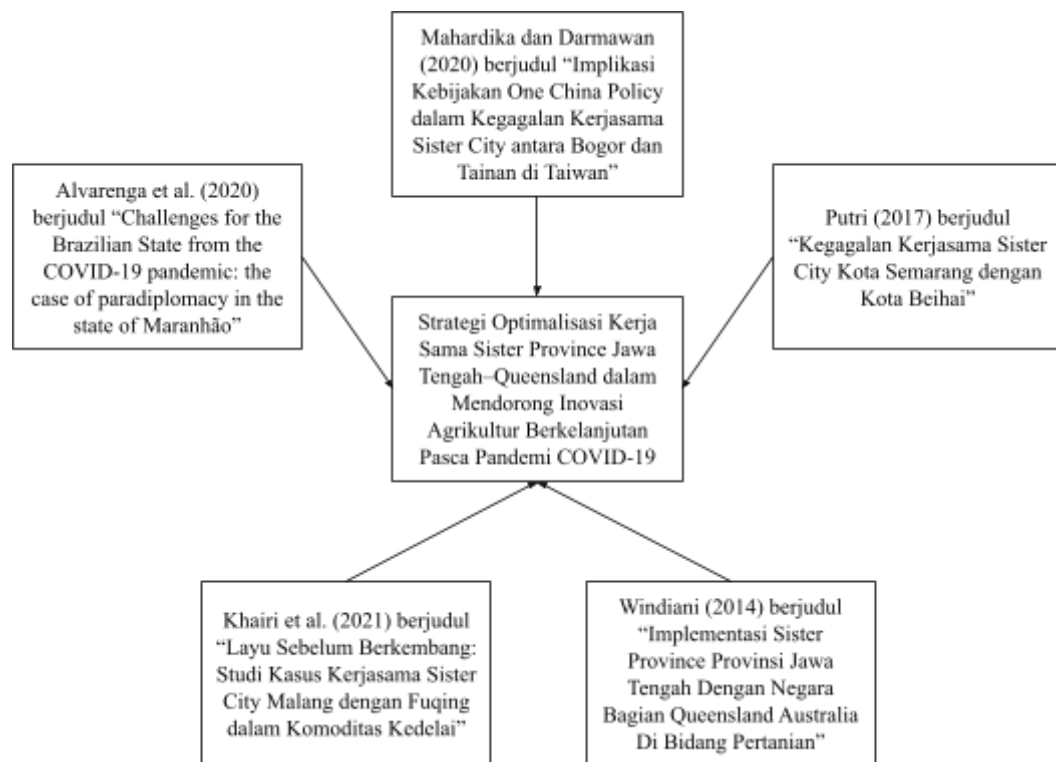
Penelitian ini memberikan gambaran strategis mengenai pemanfaatan kerja sama *sister province* untuk memperkuat kapasitas lokal, pengembangan SDM, dan transformasi digital di sektor agrikultur. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi ketimpangan manfaat dan memastikan kerja sama internasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kerja sama pemerintah daerah memang sering menjadi topik penelitian. Peneliti menjadikan beberapa penelitian ini untuk dijadikan tinjauan pustaka sebagai berikut:

Gambar 1.1. *Mind Map Literature Review*



Sumber: Diolah penulis

Pandemi Covid-19 telah membawa tantangan yang signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Brasil. Dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh Alexandre Andrade Alvarenga, Erika Maria Sampaio Rocha, Jonathan Filippon, dan Maria Angélica Carvalho Andrade (2020) berjudul *“Challenges for the Brazilian State from the COVID-19 pandemic: the case of*

paradiplomacy in the state of Maranhão” memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemerintah subnasional dapat berperan aktif dalam menghadapi krisis global. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama internasional, terutama dalam paradiplomasi, di mana pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan aktor internasional demi kepentingan masyarakat mereka.

Di Brasil, seperti di banyak negara lain, pemerintah pusat menghadapi kesulitan dalam mengelola krisis kesehatan yang melanda. Pada tahun 2020, ketika pasokan alat medis, termasuk ventilator, menjadi langka, negara bagian Maranhão menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Dalam situasi yang mendesak ini, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan aktor internasional, Maranhão berhasil mengatasi hambatan-hambatan ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran paradiplomasi sebagai strategi adaptif pemerintah subnasional dalam menghadapi krisis global seperti pandemi Covid-19. Namun, meskipun fokus pada kolaborasi lintas sektor dan lintas batas sangat relevan, penelitian ini kurang menggali secara mendalam tantangan struktural dan politik yang mungkin membatasi efektivitas paradiplomasi tersebut. Misalnya, ketergantungan pada inisiatif daerah tanpa koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan krisis secara nasional. Selain itu, studi ini cenderung menyoroti keberhasilan kasus Maranhão tanpa memberikan analisis kritis terhadap potensi ketimpangan sumber daya antardaerah

yang mungkin memperlebar kesenjangan dalam respons pandemi. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini membuka wawasan baru tentang pentingnya peran aktor subnasional, perlu ada analisis yang lebih luas mengenai faktor-faktor politik, kapasitas institusi, dan perbedaan sosial-ekonomi yang ada di berbagai daerah.

Paradiplomasi atau kerja sama *Sister Province* dan *Sister City* tidak selalu berjalan mulus, dan terdapat sejumlah contoh kegagalan yang terjadi di Indonesia. Salah satu penelitian yang mengulas hal ini adalah studi oleh Muhammad Taufan Mahardika dan Arif Darmawan (2020) berjudul “Implikasi Kebijakan *One China Policy* dalam Kegagalan Kerjasama *Sister City* antara Bogor dan Tainan di Taiwan”, yang menganalisis faktor penyebab kegagalan kerja sama *Sister City*. Mereka menemukan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya komunikasi efektif antar pihak yang terlibat dan tidak adanya hasil signifikan dari kerja sama yang dijalankan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan di tingkat daerah maupun global juga turut mempengaruhi keberlangsungan kerja sama tersebut. Contohnya, kerja sama *Sister City* antara Bogor dan Tainan, Taiwan, mengalami kegagalan akibat kebijakan *One China Policy* yang menjadi hambatan politik yang sulit diatasi, serta dominasi pemerintah pusat yang membatasi otonomi daerah dalam mengambil keputusan internasional.

Penelitian-penelitian yang membahas kegagalan paradiplomasi melalui program *Sister City* di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya implementasi yang konkret setelah tahap

peresmian, sehingga kerja sama menjadi stagnan dan tidak memberikan hasil yang signifikan. Faktor internal seperti komunikasi yang tidak efektif antar pihak terkait, kurangnya profesionalisme sumber daya manusia, serta ketidakpatuhan terhadap MoU menjadi hambatan mendasar yang menghalangi keberhasilan kerja sama ini. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional dan global, termasuk pengaruh kebijakan politik seperti *One China Policy*, juga memberikan tekanan yang sulit diatasi oleh pemerintah daerah. Keterbatasan koordinasi antar lembaga dan ketidakjelasan regulasi semakin memperparah situasi, mengakibatkan inkonsistensi pelaksanaan dan bahkan putusya hubungan kerja sama.

Studi-studi ini juga menyoroti dominasi pemerintah pusat yang membatasi otonomi daerah dalam mengambil keputusan internasional, sehingga paradiplomasi yang seharusnya menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah justru terhambat oleh struktur birokrasi dan regulasi yang kompleks. Dengan demikian, meskipun paradiplomasi memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan internasional di tingkat lokal, kegagalan yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan dan substansial. Pendekatan yang lebih komprehensif dan koordinatif antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan manfaat paradiplomasi bagi pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian Naufal Fikhri Khairi, Maliya Mulyanor, Fitria Winda Sari, Nurul Zhafira (2021) berjudul “Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama *Sister City* Malang dengan Fuqing dalam Komoditas Kedelai”. Kerja sama ini tidak berjalan lancar karena kedelai dari Fuqing kalah bersaing dengan produk dari Amerika Serikat, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kedua kota. Akibatnya, kerja sama ini terhenti dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

Kegagalan kerja sama *Sister City* antara Kota Malang dan Fuqing dalam bidang komoditas kedelai mencerminkan sejumlah kelemahan mendasar dalam pelaksanaan hubungan antar daerah yang idealnya saling menguntungkan. Pertama, kualitas kedelai dari Fuqing yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari Amerika Serikat menyebabkan produk tersebut tidak kompetitif di pasar Malang, sehingga para pelaku industri tempe lokal lebih memilih kedelai impor dari AS. Hal ini menunjukkan kurangnya kajian mendalam dan penyesuaian produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal sebelum memulai kerja sama.

Kedua, minimnya komunikasi dan koordinasi antara kedua pemerintah kota memperparah situasi, sehingga tidak ada tindak lanjut yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul. Ketidakteraturan dalam pembaruan dan pelaksanaan MoU juga menjadi faktor penghambat, yang menunjukkan lemahnya komitmen dan profesionalisme dalam manajemen kerja sama. Selain itu, tidak adanya forum diskusi lanjutan antara kedua kota mengindikasikan kurangnya mekanisme evaluasi dan penyelesaian masalah yang sistematis. Secara

keseluruhan, kasus ini menggarisbawahi pentingnya kesiapan teknis, kualitas produk, komunikasi yang intensif, dan komitmen berkelanjutan dari para pemangku kepentingan agar kerja sama *Sister City* dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

Kasus serupa juga terjadi pada penelitian Putri (2017) berjudul “Kegagalan Kerjasama *Sister City* Kota Semarang dengan Kota Beihai” yang di mana setelah penandatanganan MoU pada tahun 2008 tidak ada tindak lanjut yang nyata. Faktor internal yang menjadi kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang rumit, dan anggaran yang terbatas untuk mendukung kegiatan kerja sama secara berkelanjutan. Selain itu, kurangnya tindak lanjut dan inisiatif dari pihak pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan program dan komunikasi dengan mitra, menyebabkan stagnasi dan akhirnya penghentian kerja sama. Penelitian tersebut juga menyoroti kendala eksternal berupa krisis global dan paradigma nasional yang cenderung memandang kerja sama *Sister City* sebagai kegiatan formalitas semata, sehingga tidak mendapat perhatian serius dan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan kerja sama yang seharusnya dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak menjadi tidak optimal.

Penelitian ini dapat diarahkan pada kurangnya penjelasan mendalam mengenai strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terutama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji

secara komprehensif peran aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kerja sama, padahal literatur lain menunjukkan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk keberhasilan program *Sister City*. Dengan demikian, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat kerja sama, kajian lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan solusi yang lebih aplikatif dan holistik agar kerja sama *Sister City* dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua kota.

Penelitian Windiani (2014) membahas secara mendalam mengenai “Implementasi *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Di Bidang Pertanian”. Penelitian ini menggunakan empat indikator dari model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi, serta mengaplikasikan teori efektivitas organisasi dari Richard Steers untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan kerja sama tersebut. Windiani menyoroti bahwa meskipun terdapat komitmen dari kedua pihak dalam bentuk sumber daya manusia, waktu, dan pendanaan, implementasi program belum berjalan sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah, keterbatasan peralatan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun kerja sama *Sister Province* ini telah berlangsung sejak 1991, manfaat yang diterima oleh Queensland masih terbatas karena kemampuan dan dana yang dimiliki Jawa

Tengah belum optimal. Windiani menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program pelatihan International Training and Assessment Course (ITAC) yang dijalankan dalam kerja sama ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di bidang pertanian, sehingga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing SDM lokal.

Penelitian Windiani juga menegaskan bahwa keberhasilan paradiplomasi dalam kerja sama *Sister Province* sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Komitmen ini terlihat dari pelaksanaan pertemuan rutin, penyediaan dana bersama, dan adanya komunikasi intensif antara Jawa Tengah dan Queensland. Namun, keterbatasan dalam pelibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi tantangan yang perlu diatasi agar program kerja sama dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian Windiani (2014) memberikan gambaran bahwa efektivitas implementasi kerja sama *Sister Province* di bidang pertanian tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian pasca pandemi ini dengan mengoptimalkan kerja sama *Sister Province* Jawa Tengah-Queensland yang sangat diperlukan peningkatan kapasitas institusional, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta adopsi pendekatan yang lebih proaktif dan inovatif dalam pengelolaan kerja

sama, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang merata dan target infrastruktur yang ramah lingkungan terhadap perubahan kondisi global dan lokal. Hal ini penting agar kerja sama tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, melainkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan demi mencapai tujuan bersama.

Penelitian Windiani (2014) memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi program kerja sama *Sister Province* antara Jawa Tengah dan Queensland, khususnya dalam bidang pertanian. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi untuk memperkaya pemahaman dan aplikasi hasil penelitian tersebut. Pertama, meskipun penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan teori efektivitas organisasi Richard Steers, analisisnya cenderung berfokus pada faktor internal seperti sumber daya manusia dan struktur organisasi tanpa menggali secara mendalam pengaruh eksternal yang juga krusial, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika politik lokal, maupun kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi keberlanjutan program.

Kedua, penelitian ini menyoroti keterbatasan pelibatan masyarakat dan sektor swasta, namun kurang memberikan rekomendasi konkret atau strategi inovatif untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga kurang memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan atau pelaksana program. Ketiga, meskipun menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan ITAC, penelitian ini belum mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana teknologi digital dan inovasi

pertanian modern dapat diintegrasikan dalam program kerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat deskriptif dan kurang mendalam dalam mengevaluasi dampak jangka panjang, sehingga kurang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberlanjutan dan skalabilitas program.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengadopsi pendekatan multidisipliner dan metode evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk analisis partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini penting untuk memahami secara lebih mendalam dinamika sosial-ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Dengan cara tersebut, efektivitas kerja sama *sister province* dapat dianalisis secara lebih holistik, tidak hanya dari aspek administratif dan sumber daya manusia, tetapi juga dari segi inovasi, partisipasi masyarakat, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan global.

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengisi kekosongan dalam kajian kerja sama internasional di tingkat subnasional dengan menyoroti pentingnya optimalisasi manfaat kerja sama *sister province* Jawa Tengah dan Queensland dalam peningkatan menuju agrikultur berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai dinamika paradiplomasi yang tidak hanya melibatkan hubungan formal antar pemerintah daerah, tetapi juga keterlibatan multiaktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat, serta jaringan transnasional yang berperan dalam transfer teknologi, pelatihan, dan pengembangan kebijakan berbasis riset. Dengan mengadopsi teori interdependensi asimetris dan konsep paradiplomasi, penelitian

ini ingin menelaah secara komprehensif faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kerja sama lintas negara di sektor pertanian.

Selain itu, dalam pembahasan ini juga mengungkapkan bahwa tidak semua kerja sama *sister province* atau *sister city* berjalan efektif. Banyak kasus kegagalan kerja sama di Indonesia disebabkan oleh lemahnya komunikasi, kurangnya tindak lanjut, keterbatasan sumber daya manusia, serta perubahan kebijakan baik di tingkat lokal maupun global. Temuan ini menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kerja sama lintas daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika interdependensi asimetri dalam kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland, yang melibatkan transfer teknologi, pertukaran pengetahuan, dan kekuatan kebijakan. Fokus kajian pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu menggambarkan bagaimana kerja sama lintas negara dapat berkontribusi pada transformasi pertanian berkelanjutan di Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis, dalam memperkaya literatur dan pemahaman tentang pengembangan model kerja sama internasional yang responsif terhadap kebutuhan lokal sekaligus tantangan global.

1.5.2. Kerangka Teori

1. Interdependensi Asimetris

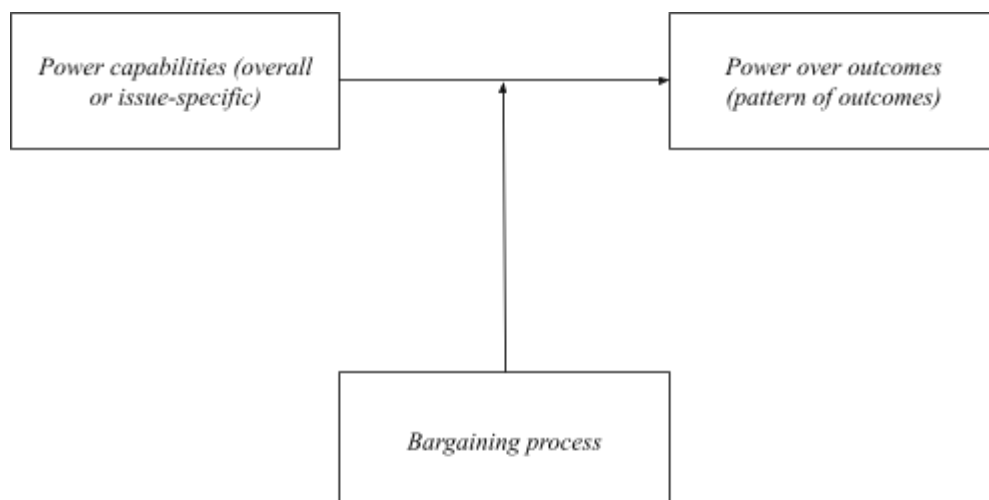
Berakar dari pemikiran Immanuel Kant dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh liberal seperti Norman Angell, Woodrow Wilson, dan kemudian Keohane & Nye. Pada buku "*Power and Interdependence: World Politics in Transition*" yang dikembangkan oleh Keohane & Nye menjadi landasan utama untuk memahami interdependensi dalam liberalisme kontemporer. Neoliberalisme institusional merupakan salah satu aliran dalam paradigma liberalisme yang menekankan bahwa modernisasi dan globalisasi telah menciptakan kondisi di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain secara ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Gagasan interdependensi ini sudah ada sejak abad ke-19 (Jørgensen, 2018), namun secara formal diperkenalkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr. (2012) pada tahun 1977 melalui karya mereka yang berjudul "*Power and Interdependence*" yang menolak pandangan realis yang memposisikan negara sebagai aktor tunggal dengan kekuatan militer sebagai alat utama dalam hubungan internasional. Sebaliknya, mereka mengemukakan bahwa politik global dibentuk oleh berbagai interaksi kompleks yang melibatkan aktor negara dan non-negara, serta isu-isu yang saling terkait seperti keamanan, perdagangan, dan komunikasi transnasional.

Interdependensi antar negara sering mendapat kritik, terutama karena dianggap terlalu optimis dalam menganggap bahwa saling ketergantungan selalu membawa perdamaian dan kerja sama (Rosyidin, 2020). Neoliberalisme institusional memperkenalkan beberapa konsep penting. Salah satunya adalah

interdependensi kompleks, yang menggambarkan hubungan saling membutuhkan antara negara dan aktor non-negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan keamanan. Hubungan ini melibatkan banyak sektor dan aktor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil. Model lain, yaitu perubahan struktural rezim internasional, menyoroti hubungan antara kapabilitas kekuasaan (*power capabilities*) yang dipengaruhi oleh aturan, norma, dan prosedur yang mengatur hubungan antarnegara, yang dapat berubah sebagai respons terhadap pergeseran kekuatan dan dinamika politik, proses perundingan (*bargaining process*), dan kekuasaan atas hasil (*power over outcomes*) dari negosiasi dan stabilitas rezim tersebut. Perubahan dalam kekuatan global atau dalam isu tertentu dapat memengaruhi pola kerja sama internasional. Namun, Keohane dan Nye mengkritik model ini karena dianggap mengabaikan faktor penting lain seperti peran politik domestik dan aktor lintas negara. Konsep interdependensi asimetris menekankan bahwa tidak semua negara saling bergantung secara seimbang. Dalam banyak kasus, satu negara lebih bergantung dibandingkan negara lainnya, sehingga negara yang lebih kuat memiliki posisi negosiasi yang lebih tinggi. Keohane dan Nye menyebut dua aspek utama dalam kondisi ini: *sensitivity* (seberapa cepat suatu negara merespons perubahan di negara lain) dan *vulnerability* (seberapa besar kerugian jika hubungan terganggu). Negara yang lebih rentan biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dan bisa ditekan oleh negara yang lebih dominan.

Dari turunan konsep tersebut, penulis mengambil fokus pada interdependensi asimetris sebagai teori utama karena konsep ini memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang dinamika hubungan internasional yang tidak selalu harmonis atau simetris. Yang terdapat dalam gambar, penulis hanya memfokuskan pada *power capabilities*. Dalam praktiknya, ketergantungan yang tidak seimbang atau interdependensi asimetris dapat menimbulkan ketegangan dan konflik kepentingan, terutama jika negara-negara kuat memanfaatkan posisi dominannya untuk menekan negara-negara yang lebih lemah. Meskipun interdependensi menciptakan hubungan saling ketergantungan, konsep interdependensi asimetris menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan dan kekuasaan dalam hubungan saling ketergantungan tidak selalu simetris. Asimetri muncul ketika satu pihak lebih bergantung pada pihak lain, sehingga menciptakan ketimpangan dalam posisi negosiasi (*bargaining position*) dan pengaruh (Keohane & Nye, 2012).

Gambar 1.2. Model Struktural Interdependensi Asimetris



Sumber: Diolah penulis dari Power and Interdependence, 2012

Interdependensi asimetris sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye (2012) merujuk pada kondisi di mana dua aktor atau lebih dalam hubungan internasional saling bergantung satu sama lain, tetapi tidak dalam tingkat yang setara. Gambar di atas menggambarkan hubungan antara tiga komponen utama: kapabilitas kekuasaan (*power capabilities*), proses perundingan (*bargaining process*), dan kekuasaan atas hasil (*power over outcomes*). Kapabilitas kekuasaan, baik secara menyeluruh maupun spesifik isu, menjadi titik awal yang menentukan posisi negosiasi suatu aktor dalam proses perundingan. Aktor yang memiliki kapabilitas lebih besar (misalnya dalam teknologi, sumber daya finansial, atau informasi) memiliki kekuatan negosiasi yang lebih kuat dalam proses perundingan/negosiasi. Hasil dari *bargaining* ini kemudian membentuk pola hasil akhir (*outcomes*) yang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan relatif masing-masing pihak. Dengan kata lain, kapabilitas kekuasaan memberikan *leverage* (manfaat) dalam proses perundingan, yang kemudian memengaruhi distribusi keuntungan dalam kerja sama.

Dalam praktiknya, analisis interdependensi asimetris perlu dikombinasikan dengan kajian kekuasaan (*power analysis*) dan ketimpangan dalam sistem internasional agar dapat memahami dinamika hubungan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa kerja sama internasional tidak selalu berjalan mulus dan bagaimana negara-negara berusaha menyeimbangkan kepentingan mereka dalam kondisi ketergantungan yang tidak seimbang. Selain itu, kondisi interdependensi yang asimetris juga menunjukkan bahwa dalam hubungan kerja sama antarnegara, kekuatan tidak lagi selalu diukur

dengan kekuatan militer atau *power coercion*, melainkan melalui *soft power* dan kemampuan persuasif.

Dalam kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland, terlihat adanya interdependensi asimetris yang signifikan, di mana Queensland memiliki keunggulan teknologi pertanian dan kapasitas riset yang tinggi, sementara Jawa Tengah masih sangat membutuhkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun terlihat terjadinya kerja sama timbal balik, Queensland dengan kapabilitas teknologinya memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dan kemungkinan besar memengaruhi hasil akhir kerja sama secara lebih signifikan dibandingkan Jawa Tengah, yang lebih bergantung pada transfer pengetahuan dan dukungan teknis. Namun, Keohane dan Nye juga menekankan bahwa ketimpangan ini tidak bersifat absolut dan tetap bisa dinegosiasikan melalui strategi komunikasi, adaptasi kelembagaan, dan diplomasi yang cerdas dari pihak yang lebih lemah. Hal ini memungkinkan terciptanya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Sehubungan dengan model struktural pada gambar 1.2, gambar tersebut berasal dari model rezim internasional. Namun, kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland dalam sektor pertanian tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari rezim internasional sebagaimana didefinisikan oleh Keohane dan Nye, yakni sistem yang terdiri atas aturan, norma, dan prosedur formal yang mengatur interaksi antarnegara dalam isu tertentu, seperti WTO dalam bidang perdagangan atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam isu perubahan iklim. Sebaliknya, kerja sama antarprovinsi ini

bersifat bilateral, lokal, dan informal, yang biasanya hanya didasarkan pada MoU antar pemerintah daerah tanpa keterlibatan lembaga internasional atau mekanisme multilateral yang mengikat. Meskipun tidak berada dalam kerangka rezim internasional, hubungan ini tetap mencerminkan interdependensi asimetris. Pihak Jawa Tengah, yang lebih membutuhkan transfer pengetahuan dan teknologi pertanian, berada dalam posisi ketergantungan yang lebih tinggi dibanding Queensland. Hal ini memengaruhi struktur negosiasi, pola hasil (*outcomes*) yang mengarah distribusi manfaat dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian, interdependensi asimetris tetap menjadi faktor penting dalam menganalisis dinamika kekuasaan dan ketimpangan dalam kerja sama antarwilayah, bahkan di luar sistem rezim formal.

Interdependensi asimetris ini menjadi faktor kunci yang menentukan dinamika hubungan kerja sama tersebut. Ketimpangan antara Queensland yang lebih maju secara teknologi dan riset dengan Jawa Tengah yang masih bergantung pada transfer teknologi dan pelatihan menciptakan posisi negosiasi yang tidak seimbang. Kondisi ini membuka peluang terjadinya *economic coercion*, yaitu situasi di mana pihak yang lebih kuat dapat menggunakan dominasi ekonominya dalam memberikan bantuan finansial.

Dalam penelitian terbaru yang membahas fenomena interdependensi asimetris, ditemukan bahwa ketimpangan dalam transmisi harga dan manfaat ekonomi sering terjadi dalam hubungan perdagangan antarwilayah, termasuk dalam sektor pertanian. Studi oleh Novianti, Mashito, dan Muryani (2020) mengenai asimetri harga beras di pasar Indonesia menunjukkan bahwa transmisi

harga antara produsen dan konsumen tidak berjalan simetris, baik dari sisi kecepatan maupun besaran penyesuaian harga. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang dapat terjadi juga dalam kerja sama lintas wilayah seperti *sister province*.

Oleh karena itu, pengelolaan posisi negosiasi dan penerapan mekanisme yang transparan dalam kerja sama menjadi sangat penting untuk meminimalisir ketimpangan manfaat dan mencegah potensi konflik kepentingan. Jawa Tengah perlu memperkuat kapasitas internalnya dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola ketergantungannya, sementara Queensland harus memastikan bahwa kerja sama berlangsung secara adil dan kooperatif. Dengan pengelolaan yang baik, kerja sama *sister province* ini tidak hanya memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak, tetapi juga dapat menjadi model inovasi agrikultur yang adaptif terhadap tantangan global dan lokal, sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan di era globalisasi yang kompleks dan dinamis.

2. Paradiplomasi

Paradiplomasi muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan daerah untuk menjalin kerja sama internasional yang relevan dengan isu-isu lokal yang berdampak global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penerapan teknologi di kondisi lokal. Paradiplomasi secara umum dipahami sebagai keterlibatan pemerintah subnasional, seperti provinsi, negara bagian, atau kota, dalam hubungan internasional.

Konsep paradiplomasi pertama kali diperkenalkan oleh Ivo Duchacek sekitar tahun 1980-an, yang mendefinisikan paradiplomasi sebagai aktivitas

internasional langsung yang dilakukan oleh aktor subnasional dalam rangka mendukung, melengkapi, memperbaiki, bahkan menantang diplomasi negara pusat. Soldatos menekankan bahwa paradiplomasi bukanlah pengganti diplomasi nasional, melainkan bentuk keterlibatan alternatif yang memperkaya hubungan internasional. Contohnya, pemerintah provinsi bisa menjalin kerja sama perdagangan dengan negara lain tanpa menunggu instruksi pusat, selama tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Konsep ini menjadi fondasi teoritis untuk memahami peran pemerintah daerah dalam politik global.

Selanjutnya, Ivo Duchacek (1990) melalui karyanya yang berjudul *“Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units”* memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa paradiplomasi merupakan keterlibatan langsung pemerintah non-pusat dalam aktivitas internasional yang mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, budaya, dan pendidikan. Duchacek menegaskan bahwa paradiplomasi tidak hanya bersifat "melengkapi" diplomasi pusat, tetapi juga bisa menjadi saluran independen bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan lokal. Misalnya, provinsi yang kaya sumber daya alam bisa langsung bernegosiasi dengan perusahaan multinasional untuk menarik investasi, tanpa harus melalui pemerintah pusat. Duchacek juga memperkenalkan konsep *perforated sovereignty*, di mana aktivitas paradiplomasi "melubangi" kedaulatan tradisional negara dengan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertindak secara mandiri di kancah global.

Alexander Kuznetsov (2015) melalui karyanya yang berjudul *“Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs”*

menambahkan bahwa paradiplomasi abad ke-21 adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan mencapai keuntungan ekonomi, budaya, politik, atau bentuk keuntungan lainnya, di mana pemerintah subnasional melakukan hubungan internasional permanen dengan aktor publik dan swasta asing. Kuznetsov menekankan bahwa paradiplomasi tidak hanya tentang kerja sama tradisional (seperti *sister city*), tetapi juga melibatkan diplomasi digital, jejaring global, dan partisipasi dalam forum internasional. Contohnya, pemerintah daerah bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk lokal ke pasar global atau berkolaborasi dengan NGO internasional untuk program lingkungan. Menurutnya, paradiplomasi modern adalah respons terhadap globalisasi yang menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola hubungan luar negeri.

Secara historis, dalam penulisan Allhadad, Pradana, & Prakoso (2025) akar paradiplomasi dapat ditelusuri hingga era Abad Pertengahan di Eropa, ketika kota-kota dagang seperti Liga Hansa menjalin hubungan internasional secara mandiri demi kepentingan perdagangan (Kuznetsov, 2015). Namun, paradiplomasi modern mulai berkembang pasca Perang Dunia II, terutama di Eropa Barat, dengan munculnya kerja sama lintas batas antara pemerintah daerah di Prancis dan Jerman yang bertujuan memulihkan hubungan bilateral dan membangun kembali kawasan yang terdampak perang (Keating, 1999). Pada dekade 1960-an, paradiplomasi semakin berkembang seiring dengan menguatnya gerakan regionalisme global, di mana Quebec menjadi pionir dengan membuka kantor perwakilan di luar negeri dan menandatangani perjanjian internasional

(Balthazar, 1999). Selanjutnya, pada periode 1970-an hingga 1980-an, paradiplomasi mengalami perkembangan pesat di berbagai kawasan dunia, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dengan negara bagian AS dan provinsi Kanada semakin aktif dalam hubungan ekonomi internasional (Hooghe, 1995; Fry, 1998). Era 1990-an hingga awal 2000-an menjadi masa institusionalisasi paradiplomasi secara global dengan pembentukan asosiasi pemerintah daerah internasional seperti *United Cities and Local Governments* (UCLG) pada tahun 2004 yang memperkuat jaringan kolaborasi antar pemerintah subnasional (Tavares, 2016).

Memasuki abad ke-21, paradiplomasi mengalami transformasi signifikan dengan aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau aktor subnasional secara langsung dengan pihak luar negeri, tanpa melalui pemerintah pusat (Cornago, 2010). Studi paradiplomasi pun semakin beragam secara geografis, termasuk di Indonesia. Paradiplomasi di Indonesia tumbuh pesat seiring dengan desentralisasi dan reformasi, di mana pemerintah daerah semakin aktif menjalin hubungan internasional meskipun tetap dalam kerangka pengawasan pemerintah pusat (Mukti, 2019).

Selain itu, menurut Chan (2016), baik Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan maupun Perjanjian Paris (Paris Agreement) secara eksplisit menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah subnasional, seperti provinsi, kota, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target global tersebut. Chan menyoroti bahwa pemerintah daerah memiliki posisi unik karena lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan serta potensi lokal, sehingga

mereka dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim. Paradiplomasi menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring global, bertukar pengalaman, serta mengakses sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan.

Acuto (2013) menyoroti bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya praktik paradiplomasi digital. Dengan adanya media sosial, platform virtual, dan komunikasi daring, pemerintah daerah kini dapat menjalin hubungan internasional secara lebih efektif, efisien, dan *realtime*. Acuto menjelaskan bahwa paradiplomasi digital memungkinkan pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi lokal, menggalang dukungan internasional, serta berpartisipasi dalam forum dan inisiatif global tanpa terkendala jarak dan biaya tinggi. Hal ini sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana kolaborasi lintas negara dan pertukaran pengetahuan menjadi kunci untuk menghadapi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Di sisi lain, paradiplomasi juga menghadapi masalah ketimpangan, terutama di bidang ekonomi. Ketimpangan ini terjadi ketika daerah yang lebih maju atau punya sumber daya lebih besar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada daerah yang kurang berkembang. Walaupun paradiplomasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, praktik ini tidak selalu berjalan lancar dan justru bisa memperlebar jurang ekonomi antarwilayah. Hal ini

disebabkan karena kemampuan dan sumber daya tiap daerah berbeda-beda, daerah yang sudah maju biasanya lebih mudah mendapatkan manfaat dari kerja sama internasional dibandingkan daerah yang masih tertinggal (McMillan, 2012; Grau Vidiella, 2013, sebagaimana dikutip dalam Schiavon, 2019). Misalnya, dalam kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland, terlihat bahwa Queensland lebih unggul dalam teknologi dan dana, sehingga Jawa Tengah belum bisa merasakan manfaat ekonomi yang sama besarnya. Jika tidak dikelola dengan baik, ketimpangan ini bisa membuat satu pihak semakin dominan dan menghambat perkembangan daerah yang lebih lemah.

Selain itu, pemerintah pusat yang masih memegang kendali besar atas urusan luar negeri sering membatasi kebebasan daerah dalam menjalankan paradiplomasi. Birokrasi yang rumit dan aturan yang banyak juga bisa menghambat kerja sama internasional di tingkat daerah, sehingga potensi paradiplomasi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membuat paradiplomasi lebih efektif, perlu ada strategi dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, untuk menjadi bentuk evaluasi kerja sama dengan cara yang lebih terkoordinasi dan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta juga penting agar manfaat kerja sama bisa dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh semua daerah.

Secara keseluruhan, paradiplomasi menunjukkan bahwa hubungan internasional sekarang semakin kompleks, apalagi di tingkat lokal seperti kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland. Kerja sama ini

seharusnya tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi semua pihak. Dengan memahami tantangan ketimpangan dan memperkuat kemampuan daerah, paradiplomasi bisa menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan mendukung bidang pertanian Jawa Tengah yang mampu beradaptasi dengan perubahan global.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1. Interdependensi Asimetris

Konsep interdependensi asimetris, sebagaimana yang dijelaskan oleh Keohane dan Nye (2012), menyoroti bahwa kondisi tingkat ketergantungan antara dua pihak tidak seimbang, sehingga satu pihak memiliki posisi perundingan (negosiasi) dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Dalam situasi ini, pihak yang lebih bergantung berada pada posisi yang lebih rentan terhadap perubahan kebijakan atau tindakan dari pihak yang lebih dominan. Interdependensi asimetris dapat menciptakan ketimpangan manfaat dan potensi konflik kepentingan, karena pihak yang memiliki keunggulan kapabilitas dapat menggunakan ketergantungan pihak lain sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau strategisnya.

2. Paradiplomasi

Konsep paradiplomasi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ivo Duchacek (1990) melalui karyanya yang berjudul “*Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*” memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa paradiplomasi merupakan keterlibatan langsung pemerintah

non-pusat dalam aktivitas internasional yang mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, budaya, dan pendidikan. Duchacek menegaskan bahwa paradiplomasi tidak hanya bersifat "melengkapi" diplomasi pusat, tetapi juga bisa menjadi saluran independen bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan lokal.

1.6.2. Definisi Operasional

1. Interdependensi Asimetris

Dalam penelitian ini, interdependensi asimetris dianalisis sebagai kondisi ketidakseimbangan dalam tingkat ketergantungan dan kapasitas sumber daya antara kedua wilayah, di mana Jawa Tengah memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap teknologi, pelatihan, dan bantuan finansial dari Queensland. Asimetri ini muncul karena perbedaan signifikan dalam kapasitas ekonomi dan teknologi pertanian, di mana Queensland sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan teknologi maju memegang posisi dominan. Melalui lensa teori interdependensi asimetri, kondisi ini tidak hanya mencerminkan hubungan ketergantungan satu arah, tetapi juga interaksi multidimensi yang melibatkan berbagai aktor dan isu, termasuk aspek sosial dan kebijakan publik. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan kerja sama yang benar-benar saling menguntungkan dan berkelanjutan, karena pihak yang lebih lemah (Jawa Tengah) memiliki posisi negosiasi yang terbatas dalam negosiasi dan implementasi program bersama.

Penelitian Reni Windiani (2014) mengenai “Implementasi *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Di Bidang

Pertanian” menegaskan bahwa Jawa Tengah sangat bergantung pada teknologi dan pelatihan yang disediakan oleh Queensland, sementara Queensland menguasai teknologi dan sumber daya utama yang dibutuhkan dalam kerja sama tersebut. Kondisi ini menciptakan dinamika interdependensi asimetris, di mana ketimpangan kapasitas dan sumber daya antara kedua wilayah memengaruhi distribusi manfaat kerja sama, dengan Jawa Tengah berada pada posisi yang lebih lemah. Selaras dengan hal ini, Masrohatun (2018) dalam penelitiannya “Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri *Sister Province* di Provinsi Jawa Tengah” menambahkan bahwa interdependensi asimetris tersebut menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan kerja sama luar negeri, karena Jawa Tengah harus mampu mengelola ketergantungan tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan manfaat yang merugikan pihaknya. Kedua penelitian ini secara jelas mengilustrasikan bagaimana teori interdependensi asimetris yaitu ketidakseimbangan dalam tingkat ketergantungan dan kekuasaan antarpihak berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan keadilan dalam kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland.

2. Paradiplomasi

Paradiplomasi dalam kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland menekankan bahwa aktivitas diplomasi dan kerja sama internasional yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah Jawa Tengah dengan Queensland, tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Paradiplomasi ini berperan sebagai mekanisme strategis untuk mengatasi keterbatasan kapasitas lokal melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan sumber daya dari mitra

internasional. Namun, ketimpangan ekonomi yang ada, khususnya dalam hal distribusi manfaat dan peluang pasar, menimbulkan risiko bahwa paradiplomasi dapat memperkuat posisi dominan Queensland dan memperdalam ketergantungan Jawa Tengah. Dari perspektif interdependensi asimetri, paradiplomasi bukan hanya soal hubungan bilateral ekonomi, tetapi juga melibatkan berbagai aktor dan dimensi yang harus dikelola secara inklusif agar ketimpangan ekonomi tidak menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian Wiyototsani, Alam, & Dermawan (2024) mengenai “Paradiplomasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mempromosikan UMKM Jawa Tengah pada Pameran Internasional (2019-2023)”, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah dalam menggunakan kerja sama *sister province* untuk mempromosikan UMKM dan transfer teknologi adalah kesulitan dalam memastikan distribusi manfaat yang merata di antara pelaku UMKM dan berbagai sektor terkait. Tantangan ini muncul karena keterbatasan kapasitas administratif, perbedaan akses informasi, serta ketimpangan sumber daya yang menyebabkan sebagian kelompok UMKM belum sepenuhnya dapat mengakses peluang yang tersedia. Hal ini sejalan dengan konsep paradiplomasi yang menekankan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjalin hubungan internasional secara langsung, efektivitas paradiplomasi sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola hubungan tersebut secara inklusif dan partisipatif. Paradiplomasi bukan hanya soal menjalin kerja sama, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga

menghindari risiko memperdalam ketimpangan ekonomi lokal. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang transparan menjadi kunci agar paradiplomasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan daerah yang inklusif.

1.7. Argumentasi Penelitian

Kerja sama subnasional antara Jawa Tengah dan Queensland melalui skema *sister province* dapat dioptimalkan sebagai strategi transformasi sektor pertanian yang lebih berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Dengan mempertimbangkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki kontribusi besar terhadap PDRB regional dan ketahanan pangan nasional namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya adopsi teknologi, ketimpangan kebijakan, dan dampak perubahan iklim, maka kolaborasi internasional menjadi instrumen penting yang perlu dimaksimalkan. Melalui pendekatan teori interdependensi asimetri dari Keohane dan Nye, serta konsep paradiplomasi dari Ivo Duchacek, penelitian ini mengkaji bagaimana ketergantungan tidak seimbang antara dua entitas dapat dikelola secara strategis oleh aktor subnasional seperti pemerintah daerah untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pengetahuan dari mitra internasional. Queensland yang memiliki keunggulan dalam teknologi pertanian berkelanjutan dan infrastruktur riset pertanian, menjadi mitra yang potensial untuk mendukung transformasi pertanian di Jawa Tengah. Maka, penting untuk merumuskan strategi optimalisasi yang tepat agar hubungan paradiplomatik ini tidak hanya bersifat simbolis atau administratif, tetapi dapat memberikan dampak konkret seimbang terhadap

peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat lokal kedua aktor tersebut.

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodenya. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dikembangkan dalam ilmu sosial yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya secara mendalam (Denzin & Lincoln, 2018). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara holistik dinamika kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland, khususnya dalam penerapan teknologi pertanian yang berbasis perbedaan iklim dan pangan pasca pandemi Covid-19.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Biklen (2007) dalam “*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi optimalisasi kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland dalam sektor agrikultur berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Dalam proses analisis, digunakan teori interdependensi asimetris serta konsep paradiplomasi untuk mengkaji hubungan kekuasaan dan strategi kolaboratif antar pihak yang terlibat.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah di Indonesia dan Negara Bagian Queensland di Australia.

1.8.3. Subjek Penelitian

Orang, objek, atau makhluk hidup yang dapat dianggap sebagai topik penelitian jika mereka dapat memberikan data yang berguna untuk penelitian ilmiah. (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah para aktor kunci yang terlibat dalam kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland, seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga pertanian, pelaku penerapan teknologi agrikultur, serta mitra kerja sama dari pihak Queensland.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Nurdin & Hartati, 2019). Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumen resmi, pernyataan pemerintah, undang-undang, serta artikel dan laporan yang diunggah melalui situs resmi pemerintah Jawa Tengah maupun Queensland.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah asal-muasal data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Data sekunder berasal dari dokumen, jurnal, artikel, dan kutipan pernyataan yang berkaitan dengan *Sister Province* Jawa Tengah-Queensland, termasuk dokumen dari website resmi pemerintah dan pernyataan Gubernur Jawa Tengah.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua teknik utama pengumpulan data tanpa wawancara, yakni penelitian berbasis dokumen dan penelitian berbasis internet.

Pertama, penelitian berbasis dokumen melibatkan analisis sistematis terhadap berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sangat bermanfaat dalam studi mengenai konflik internasional, organisasi, dan kebijakan, karena dokumen menyediakan informasi yang kaya, resmi, dan dapat diverifikasi. Jenis dokumen yang umum digunakan mencakup perjanjian internasional, laporan resmi lembaga, pernyataan kebijakan, undang-undang, arsip organisasi, serta artikel media. Dokumen-dokumen ini dapat berfungsi sebagai sumber primer apabila merupakan produk langsung dari peristiwa atau aktor yang diteliti (misalnya MoU antarnegara bagian), atau sekunder bila merupakan interpretasi atau analisis dari pihak ketiga (Bowen, 2009). Teknik ini juga memungkinkan triangulasi data dan meminimalkan risiko bias persepsi dari informan manusia.

Kedua, penelitian berbasis internet digunakan untuk mengakses sumber-sumber ilmiah digital seperti artikel jurnal, e-book, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga-lembaga internasional atau pemerintah. Selain itu, internet juga menyediakan akses cepat ke data mutakhir melalui situs berita kredibel, siaran pers resmi, dan portal lembaga kebijakan. Penelitian berbasis internet telah menjadi teknik pengumpulan data yang sah dalam ilmu sosial modern karena fleksibilitas dan jangkauan luasnya terhadap data berkualitas tinggi (Reips, 2006). Peneliti harus memastikan validitas dan kredibilitas sumber yang diakses secara daring, dengan mengutamakan repository akademik, jurnal terindeks, dan situs institusi resmi. Kedua metode ini saling melengkapi dalam mendukung kajian deskriptif maupun analitis, khususnya dalam paradiplomasi dan kerja sama lintas

negara bagian, di mana banyak data penting tersedia dalam bentuk digital maupun dokumenter.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini pertama tama mengumpulkan dan mencatat semua data yang relevan dengan penelitian, data yang terkumpul kemudian disusun dan dirinci sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya mengolah data data tersebut untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi atas perhitungan pada tujuan penelitian ini.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Untuk memastikan kualitas data, penulis hanya menggunakan sumber data yang kredibel dan terverifikasi, seperti jurnal internasional dan nasional terakreditasi SCOPUS dan dikti SINTA seperti jurnal universitas yaitu E-Journal Undip, lalu menggunakan jurnal-jurnal internasional seperti Research Gate, Academia.edu, Journal Storage (JSTOR), serta dokumen resmi pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber akurat dan terpercaya karena telah melewati hasil yang sudah teruji kredibilitasnya. Pengujian kualitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode, serta dokumen melalui *cross-check* antarnarasumber dan literatur ilmiah.